

PERAN PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENGURANGI KESENJANGAN SOSIAL DAN EKONOMI DI INDONESIA

Okta Dwi Pratiwi¹, Achmad Akmaluddin²

Program Studi Psikologi, Universitas Bina Darma Palembang

pratiwioktadwi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission:

Review:

Revised:

Accepted:

Published:

Kata Kunci

Pancasila

Kesenjangan Sosial

Ekonomi

ABSTRAK

Pancasila, sebagai landasan ideologi negara Indonesia, memuat nilai-nilai luhur yang esensial dalam membentuk karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut, yang terangkum dalam lima sila, saling berkaitan dan menjiwai satu sama lain, membentuk kesatuan yang utuh. Namun, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan serius, bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi demografi, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan geografis, turut berkontribusi terhadap terjadinya kesenjangan ini. Pendidikan Pancasila memegang peranan krusial dalam mengatasi permasalahan ini. Melalui penanaman nilai-nilai Pancasila, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang memperjuangkan keadilan, toleransi, dan persatuan. Pendidikan Pancasila juga mendorong etika bisnis yang bertanggung jawab, partisipasi aktif dalam pembangunan, serta pembentukan karakter moral dan etika yang kuat. Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan yang efektif dan merata, serta upaya nyata dalam mengatasi faktor-faktor penyebab kesenjangan, menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya dan geografis yang sangat luas, menghadapi tantangan yang kompleks dalam pembangunan nasional. Salah satu tantangan utamanya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi masalah serius. Kesenjangan tersebut terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari akses yang tidak merata terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, hingga distribusi pendapatan yang tidak merata. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai luhur yang seharusnya dijadikan pedoman dalam mengatasi kesenjangan tersebut. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi, memberikan arah bagi upaya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan makmur. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata masih menghadapi berbagai kendala (Kusumawati, 2022).

Pendidikan Pancasila memegang peranan krusial dalam menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini. Melalui pendidikan, generasi muda diharapkan dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, efektivitas pendidikan Pancasila dalam mengurangi kesenjangan masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan.

Menurut (Istianah, 2023), salah satu aspek penting dalam pendidikan Pancasila adalah penanaman kesadaran akan pentingnya keadilan sosial. Hal ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban setiap warga negara, serta pentingnya solidaritas dan gotong royong dalam mengatasi permasalahan bersama. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat membentuk karakter individu yang peduli terhadap sesama dan memiliki tanggung jawab sosial.

Selain itu, pendidikan Pancasila juga perlu menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam era globalisasi, kemampuan untuk bersaing secara ekonomi menjadi sangat penting. Pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi mereka, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

Namun, tantangan dalam implementasi pendidikan Pancasila tidaklah kecil. Kurikulum yang ada perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, tenaga pendidik juga perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, serta kemampuan untuk mentransformasikannya kepada peserta didik.

Selain itu, peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan terbentuk lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter yang berlandaskan Pancasila.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kebijakan yang mendukung implementasi pendidikan Pancasila. Kebijakan-kebijakan tersebut perlu diarahkan untuk memastikan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks kesenjangan ekonomi, pendidikan Pancasila juga dapat berperan dalam menanamkan etika bisnis yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, diharapkan tercipta praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

Pendidikan Pancasila juga perlu mengintegrasikan pemahaman tentang keberagaman budaya dan etnis di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih toleran dan inklusif, yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan efektivitas pendidikan Pancasila. Melalui teknologi, materi-materi pendidikan dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan minat dan pemahaman peserta didik (Anggraini, 2023).

Dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, pendidikan Pancasila perlu berjalan beriringan dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara pendidikan dan pembangunan, sehingga dapat mencapai tujuan bersama

Metode

Pendekatan Penelitian yang dipakai adalah Kualitatif. Menurut Sujarweni (2024), metode yang digunakan yaitu kajian literatur, metode penelitian ini dipakai karena memungkinkan peneliti untuk mencari dan menggali informasi seputar peran Pancasila dalam di tengah arus Globalisasi. Sumber data dalam penelitian ini mencakup jurnal, buku, artikel, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Menurut (Siregar, 2024), pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang mengandung nilai karakter. Nilai-nilai Pancasila tersebut adalah :

1. Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," adalah fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai ketuhanan yang terkandung di dalamnya menegaskan keyakinan akan adanya Tuhan yang tunggal, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Pasal ini memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Implementasi nilai ketuhanan ini tidak hanya terbatas pada hubungan pribadi dengan Tuhan melalui ibadah, tetapi juga mencakup toleransi dan saling menghormati antarumat beragama. Dengan menjunjung tinggi nilai ketuhanan, diharapkan dapat tercipta kerukunan dan persatuan dalam masyarakat, serta mencegah terjadinya intoleransi dan perpecahan. Ketakwaan kepada Tuhan juga menjadi landasan moral dalam kehidupan sehari-hari, yang membantu individu untuk menghindari perbuatan negatif. Bagi peserta didik, pemahaman dan pengamalan sila pertama Pancasila berperan penting dalam pembentukan karakter moral dan etika, serta menciptakan lingkungan yang harmonis di keluarga, sekolah, dan masyarakat.
 2. Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menempatkan manusia Indonesia sebagai bagian integral dari komunitas global, yang menjunjung tinggi kesetaraan harkat, derajat, dan martabat sebagai ciptaan Tuhan. Nilai kemanusiaan ini menekankan hubungan timbal balik antarindividu, yang diwujudkan melalui rasa cinta kasih, saling menghormati hak asasi manusia, dan gotong royong. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesejahteraan sosial, penghidupan yang layak, hak politik, dan kesetaraan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, atau latar belakang lainnya. Inti dari sila kedua ini adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, kepedulian sosial, dan perilaku beradab. Nilai-nilai ini mendorong terciptanya keadilan, kesetaraan, dan empati terhadap sesama. Melalui pendidikan, peserta didik diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan ini dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui tindakan yang adil, beradab, dan inklusif di berbagai aspek kehidupan.
-

3. Sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," mengajarkan pentingnya nasionalisme, cinta tanah air, dan persatuan bangsa. Perbedaan yang ada di Indonesia, seperti suku, agama, ras, dan golongan, adalah anugerah yang harus disyukuri dan disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi sumber konflik, melainkan diikat dengan rasa persatuan yang kuat untuk mencegah perpecahan dan disintegrasi bangsa. Inti dari sila ketiga ini adalah penguatan identitas nasional, kerja sama, dan penghargaan terhadap keragaman. Nilai-nilai ini mendorong sikap saling menghargai dan komitmen terhadap kepentingan bersama, serta mengintegrasikan prinsip persatuan dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui pendidikan, peserta didik diharapkan dapat memperkuat rasa kebersamaan dan berkontribusi aktif dalam pembangunan yang inklusif dan harmonis.
 4. Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menekankan nilai demokrasi dan permusyawaratan dalam kehidupan bernegara. Nilai kerakyatan ini mengandung tanggung jawab, harmoni, kekeluargaan, dan gotong royong, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia sebagai negara demokratis. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat, di mana pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Inti dari sila keempat ini adalah partisipasi aktif, kepemimpinan bijaksana, dan dialog konsensus. Nilai-nilai ini mendorong keterlibatan dalam pengambilan keputusan, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif. Melalui pendidikan, peserta didik diharapkan dapat berperan dalam proses pembangunan yang demokratis, adil, dan berkelanjutan, serta mempromosikan kepemimpinan yang bijaksana dan inklusif.
 5. Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan diwujudkan melalui pemberian hak orang lain, perlakuan adil, penggunaan hak milik yang tidak merugikan kepentingan umum, serta penghargaan terhadap hasil karya orang lain. Rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, kesetaraan, kesejahteraan sosial, penghormatan HAM, dan persamaan hak di segala bidang. Keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah kunci untuk mencegah kesenjangan sosial. Inti dari sila kelima ini adalah kesetaraan hak dan kesempatan, pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial,
-

dan keadilan dalam pembangunan. Nilai-nilai ini mendorong distribusi sumber daya yang adil, partisipasi aktif, dan representasi yang merata.

Kesenjangan sosial merupakan isu penting dalam dinamika sosial dan ekonomi suatu negara. Dalam sila ke-5 Pancasila yang menekankan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, hal ini menjadi salah satu landasan utama dalam upaya penanggulangan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial mengacu pada perbedaan yang signifikan dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan manfaat antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap fasilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran keadilan sosial dalam penanggulangan ketimpangan sosial, dengan berfokus pada perwujudan sila ke-5 Pancasila. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran penting sila ke-5 Pancasila dalam penanggulangan ketimpangan sosial di Indonesia. Dengan memahami kompleksitas hubungan antara keadilan sosial dan ketimpangan sosial, diharapkan kita dapat mengambil langkah yang lebih tepat dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan merata (Aqilah, 2023).

Menurut (Novitasari, 2023), kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat semakin terlihat karena sebagian masyarakat Indonesia kurang mampu mengikuti arus globalisasi, disebabkan oleh perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengikuti arus globalisasi. Kesenjangan sosial merupakan perbedaan ekonomi atau pendapatan antara satu individu dengan individu lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yaitu perbedaan sumber daya alam, kebijakan pemerintah, pengaruh globalisasi, dan lain-lain. Kesenjangan sosial memiliki beberapa dampak antara lain: meningkatnya pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, tingginya kasus kriminalitas atau kriminalitas. Dampak globalisasi memiliki ciri-ciri yaitu dirasakan oleh sebagian masyarakat, kondisi yang dirasakan tidak menyenangkan. Kesenjangan sosial dapat diatasi dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara tepat, menjamin akses bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan melaksanakan pembangunan yang berkeadilan.

Pancasila merupakan unsur terpenting dalam tubuh negara Indonesia. Dalam sila ke-5 yang berpedoman pada "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" kini belum berjalan sepenuhnya. Keadaan ini yang menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia, khususnya pada kota-kota besar di Indonesia yang menimbulkan aspek keadilan lantaran adanya sikap atau kebijakan pemerintah yang tidak seimbang atau merata. Jika dihubungkan dengan perekonomian sudah jelas adanya perbedaan dalam distribusi pendapatan, seperti setiap daerah yang berbeda dalam pertumbuhan atau pembangunan ekonominya dan adanya kebijakan publik dari pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat kalangan menengah bawah (Kuswanto, 2023).

Kesenjangan sosial lebih menyudutkan pada situasi dari proses tersebut sehingga terdapat faktor eksternal dan faktor internal yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di Indonesia. Faktor eksternal yang memengaruhi kesenjangan sosial masyarakat di Indonesia, yakni :

1. Kondisi demografi

Kondisi demografi, seperti pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, distribusi penduduk yang tidak merata, dan struktur usia yang tidak seimbang, dapat memengaruhi kesenjangan sosial. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi sering kali mengalami tekanan pada sumber daya dan layanan publik, sementara wilayah dengan kepadatan penduduk rendah mungkin kesulitan untuk mengembangkan infrastruktur dan ekonomi.

2. Kondisi pendidikan

Akses dan kualitas pendidikan yang tidak merata menjadi faktor utama dalam kesenjangan sosial. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki peluang ekonomi yang lebih terbatas, akses terhadap informasi yang kurang, dan partisipasi sosial yang rendah. Kesenjangan dalam pendidikan juga dapat memperkuat siklus kemiskinan antar generasi.

3. Kondisi ekonomi

Ketimpangan distribusi pendapatan, akses terhadap modal, dan peluang ekonomi merupakan faktor penting dalam kesenjangan sosial. Konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil masyarakat dan kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi bagi kelompok lain dapat menciptakan jurang yang lebar antara kaya dan miskin

4. Kondisi kesehatan

Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan dalam akses kesehatan dapat menyebabkan perbedaan dalam angka harapan hidup, tingkat penyakit, dan kualitas hidup. Masyarakat dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan cenderung lebih rentan terhadap penyakit dan memiliki produktivitas yang lebih rendah.

5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan akar dari banyak masalah kesenjangan sosial. Kemiskinan membatasi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, serta dapat menyebabkan isolasi sosial dan marginalisasi. Siklus kemiskinan antar generasi sulit diputus tanpa intervensi yang komprehensif.

6. Tidak meratanya lapangan pekerjaan di Indonesia

Distribusi lapangan pekerjaan yang tidak merata di Indonesia, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, menjadi salah satu pemicu utama kesenjangan sosial. Kurangnya lapangan pekerjaan di daerah pedesaan mendorong urbanisasi yang berlebihan, yang kemudian menciptakan masalah baru di perkotaan, seperti permukiman kumuh dan pengangguran.

7. Adanya perbedaan status sosial di dalam tubuh masyarakat

Perbedaan status sosial, yang sering kali didasarkan pada faktor-faktor seperti keturunan, kekayaan, atau pendidikan, dapat menciptakan hierarki sosial yang kaku. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, serta membatasi mobilitas sosial.

8. Letak geografis di Indonesia yang berbeda-beda

Kondisi geografis Indonesia yang beragam, dengan pulau-pulau yang tersebar dan kondisi alam yang berbeda-beda, dapat menyebabkan perbedaan dalam akses terhadap infrastruktur, sumber daya alam, dan layanan publik. Wilayah-wilayah terpencil atau dengan kondisi alam yang sulit sering kali tertinggal dalam pembangunan.

Pendidikan Pancasila memegang peranan penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran kunci yang dimainkan oleh pendidikan Pancasila:

1. Menanamkan Nilai Keadilan Sosial

Pendidikan Pancasila mengajarkan nilai-nilai keadilan sosial, yang menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai ini, generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang memperjuangkan keadilan bagi semua.

2. Membangun Kesadaran akan Hak dan Kewajiban

Melalui pendidikan Pancasila, siswa belajar tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kesadaran ini penting untuk memastikan bahwa setiap orang memahami hak-hak mereka dan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat.

3. Mendorong Toleransi dan Persatuan

Pendidikan Pancasila juga berperan dalam mempromosikan toleransi dan persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, siswa dapat membantu menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

4. Mengembangkan Etika Bisnis yang Bertanggung Jawab

Dalam konteks ekonomi, pendidikan Pancasila dapat menanamkan etika bisnis yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Ini penting untuk menciptakan praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

5. Mempromosikan Partisipasi Aktif dalam Pembangunan

Pendidikan Pancasila mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dengan memahami nilai-nilai demokrasi dan permusyawaratan, siswa dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang adil dan berkelanjutan.

6. Membentuk Karakter Moral dan Etika

Pendidikan Pancasila berperan penting dalam pembentukan karakter moral dan etika peserta didik. Dengan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, diharapkan tercipta generasi muda yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.

7. Menumbuhkan Rasa Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Pendidikan Pancasila juga berperan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Dengan memahami sejarah dan budaya Indonesia, siswa diharapkan dapat menjadi warga negara yang bangga dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Kesimpulan

Pancasila merupakan fondasi nilai karakter yang esensial bagi bangsa Indonesia. Setiap sila mengandung nilai-nilai luhur yang saling berkaitan dan menjiwai satu sama lain, membentuk suatu kesatuan yang utuh. Nilai Ketuhanan menekankan pentingnya keyakinan dan toleransi beragama, Kemanusiaan menjunjung tinggi kesetaraan dan hak asasi manusia, Persatuan mengedepankan nasionalisme dan keragaman, Kerakyatan mendorong demokrasi dan musyawarah, serta Keadilan Sosial menuntut kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kesenjangan sosial, yang merupakan tantangan serius bagi Indonesia, bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila, khususnya sila kelima. Faktor-faktor eksternal seperti demografi, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemiskinan, lapangan pekerjaan, status sosial, dan kondisi geografis, turut berkontribusi terhadap terjadinya kesenjangan ini.

Pendidikan Pancasila memainkan peran krusial dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Melalui penanaman nilai-nilai Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang memperjuangkan keadilan, toleransi, dan persatuan. Pendidikan Pancasila juga mendorong etika bisnis yang bertanggung jawab, partisipasi aktif dalam pembangunan, serta pembentukan karakter moral dan etika yang kuat. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan yang efektif dan merata, serta upaya nyata dalam mengatasi faktor-faktor penyebab kesenjangan, menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila.

Daftar Pustaka

- Anggraini, M. (2023). Pendidikan Multikultural Sebagai Implementasi Profil Pelajar Pancasila Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti. *Jurnal Studi Islam*.
- Aqiilah, I. N. (2023). Peran Keadilan Sosial dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial : Evaluasi terhadap Realisasi Sila Kelima Pancasila. *Researchgate*.
- Istianah, A. (2023). Konsep Sekolah Damai: Harmonisasi Profil Pelajar Pancasila Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Education and Development*.
- Kusumawati, I. (2022). *Pengantar Pendidikan*. Batam: CV Rey Media Grafika.
- Kuswanto. (2023). *Identitas Nasional di Era Globalisasi*. Malang: Inara Publisher.
-

Novitasari, S. (2023). Pentingnya peran Pancasila bagi generasi muda dalam menghadapi globalisasi. *no june*.

Peran Pendidikan Kebinekaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Damai. (n.d.).

Siregar, I. (2024). Peran Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar Nasional PPGFKIP UPR*.
